

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamid S. Attamimi, 1993 *"Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan/ Hukum Tata Pengaturan"*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Achmad Ruslan, 2011. *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Rangkang Education, Yogyakarta.
- _____, (2023). *Teori dan panduan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Rajawali pers. jakarta
- Aminuddin Ilmar, 2013. SH.,MH. *Hukum Tata Pemerintahan*, indentitas Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar.
- Bernard L. Tanya, dkk. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Blegur, "Asas-Asas Hukum Utama Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,"
- Calvin, 2019, *Analisis Yuridis Putusan DKPP No. 280/DKPP-PKE-VII/2018 dan 281/DKPP-PKE-VII/ 2018 Tentang Pemberhentian Tetap Anggota Bawaslu Kota Batam Saudara Suryadi Prabu*. UIB Repository.
- Cst Kansil, dkk. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta.
- Hans Kelsen, 2011. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, trans. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media,).
- Hartono, 2020. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Irwansyah, 200, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2017. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Revisi)*. Sinar Grafika.
- _____. 2021. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika.
- _____, 2013 *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.



- _____, 2011. *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta
- yadi, 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan tik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan*

kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan), Mandar Maju. Bandung.

Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud MD, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty. Ed.1. Cet. 2.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998. *Ilmu Perundang-undangan DasarDasar dan Pembentukannya*, Kanisius. Yogyakarta.

_____, 2007. *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan-Jilid 1)*, Penrbit: Kanisius, Yogyakarta

Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. (2023). *Dasar-dasar ilmu hukum: memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum*. Rajawali Pers.

Ni'matul Huda, "*Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*", Cetakan Pertama (Yogyakarta : FH UII Press, 2018).

Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta

_____, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta.

_____, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 13, Kencana, Jakarta.

Purbopranoto, Kuntjoro. 1981, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Alumni. Bandung. Philippe Nonet, dkk. 2010. *Hukum Responsif*. Nusa Media, Bandung.

Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, Pustaka Kartini. Jakarta.

_____, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung.

Ridwan H.R., 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Safri Nugraha dkk, 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Center for Law and Good Governance Studies (CLGS). Jakarta.

Sedarmayanti, 2012. *Good Governance Kepemerintahan Yang baik Bagian Kedua*, Mandar Maju. Bandung.

Sodikin, 2014. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi.

Soemitro, Rochmat, 1998, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Rafika ama, Bandung.

Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, ersitas Atma Jaya Yogyakarta.



Teguh Prasetyo, 2018, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Rajawali Pers. Depok.

Tjandra W. Riawan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Jurnal

Andre G. Mawey. 2016. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*. Lex Crimen. Vol. V. No. 2.

Angraini, Fauziah Suci. 2021. "Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal dan Eksternal," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*: Vol. 1 : No. 1.

Anita Marlin Restu Prahastapa, et.all, "Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, Nomor 2, 2017.

Aspan, Z., & Suwandi, W. (2022). *Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum*. *Japhtn-Han*, 1(1).

Cita Auliana, *7 Dampak Putusan DKPP Tak Lagi Final dan Mengikat*. Kumparan.com, 2020

Dyan Puspitasari. "Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Pemilihan Umum di Indonesia." *Lentera Hukum* 5, no 3 (2018).

Dola Riza, "Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, Nomor 1, 2018.

Harum Isnin and Novia Wahyu Wardhani, 2021. "Pancasila as a Margin of Appreciation in the Implementation of Human Rights in Indonesia Citizenship Education Perspective," *Jurnal Scientia Indonesia* 7, no. 1.

Jimly Asshiddiqie "Pengenalan Tentang DKPP Untuk Penegak Hukum", disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia, Februari 2013.

Putri Dima Kusuma, 2016 *Menakar Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)*, *Jurnal Transformative*, Vol. 2, No 1.

Siti Nurhalimah, 2017. "Penerapan Judicial Restraint Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Adalah: Riset Hukum dan Keadilan* 1, no. 7.



Besar Bahasa Indonesia

gan Saksi Ahli Saldi Isra, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. UU-VIII/2010 tentang pengujian UU No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu terhadap UUD 1945

Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum, 2020, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2020.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali. 2016,.

Peraturan Perundang-Undangan/Putusan pengadilan;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Hormat anggota KPU Evi Novida Ginting masa jabatan Tahun 2017-2022

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 597/HK.06.4/04/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap UUD 1945

Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010

Putusan MK Nomor 32/PUUXIX/2021

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 159-PKE-DKPP/VII/2021

Putusan DKPP Nomor 317 Tahun 2019, dkpp.go.id, <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Putusan-Nomor-317-Tahun-2019-KPU-RI-dan-KPU-Prov-Kalimantan-Barat.pdf>.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan dan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan



-Sumber Internet

Admin. 2022. “Jenis-Jenis Putusan Hakim”. <http://mh.uma.ac.id>.

M. Natsir Asnawi. 2022. *Eksekusi Putusan Declaratoir*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.

Sigar Aji Poerana. 2022. “Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, Konstitutif, dan Kondemnator”, <https://www.hukumonline.com>.

